



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 362/V.09/HK/2022**

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafiking;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026.**

KESATU : Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana aksi daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pedoman bagi gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- c. pemberantasan tindak pidana kedalam klaster program sebagai berikut:
 - 1) Pencegahan dan partisipasi anak, sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - 2) Rehabilitasi kesehatan, sebagai penanggungjawab adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - 3) Rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial, sebagai penanggungjawab adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung;

- 4) Pengembangan norma hukum, sebagai penanggungjawab adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung;
- 5) Penegakan hukum, sebagai penanggungjawab adalah Kepolisian Daerah Lampung;
- 6) Koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan *trafficking*, sebagai penanggungjawab adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Lampung di Bandar Lampung.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Sosialisasi dan edukasi	Menyebarkan pesan-pesan anti perdagangan orang melalui materi-materi yang disampaikan oleh PUSPA		Kesadaran masyarakat terhadap TPPO dan korban							Forum PUSPA Provinsi Lampung
		Dukungan terhadap aktifitas LM untuk pencegahan dan penanganan kasus TPPO		Keaktifan LM-LM dalam PUSPA untuk pencegahan dan penanganan kasus TPPO	LM						Forum PUSPA Provinsi Lampung
10	Pengelolaan Pendidikan SMA	Pengelolaan Pendidikan SMA	Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa	Penyuluhan Minat, Bakat dan Prestasi Siswa di Bidang Akademik, Olahraga dan Seni Budaya	Siswa SMA Se Provinsi Lampung melalui Kegiatan Lomba Lomba Kesiswaan dan Dialog Kebangsaan	100 siswa	100 Siswa				Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung
11	Pengelolaan Pendidikan SMA	Pengelolaan Pendidikan SMA	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Bimtek Rencana Aksi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia	Waka Kesiswaan dan Siswa SMA Se Provinsi Lampung	-	-	50 Guru dan 100 Siswa Ketua OSIS	100 Guru dan 200 Siswa Ketua OSIS	150 Guru dan 250 Siswa Ketua OSIS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung
12	Penyediaan Informasi melalui layanan hotline		- Kampanye untuk membangun opini untuk pencegahan KIP/A dan TPPO baik offline dan online - layanan hotline untuk pengaduan	Masyarakat dan Perempuan korban KIP/A dan TPPO							Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
13	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan	Pelaku Koperasi dan UMKM	845 orang	766 orang	767 orang	768 orang	845 orang	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung
14	PENANAMAN NILAI MODERASI BERAGAMA DAN PATRIOTISME PADA PESANTREN	WORKSHOP DAN SOSIALISASI	MATERI MODERASI BERAGAMA DAN PATRIOTISME	SANTRI YANG MODERAT DAN PATRIOTIK	SANTRI PONDOK PESANTREN	3	1				Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
15	BEA SISWA SANTRI BERPRESTASI (PBSB)	TES DAN PENERIMAAN SANTRI BERPRESTASI		SANTRI YANG LULUS DAN MENDAPAT BEASISWA UNTUK KULIAH DI UNIVERSITAS TERNAWA DI INDONESIA	SANTRI PONDOK PESANTREN						Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
16	SOSIALISASI EDARAN DIRJEN PENDIS TENTANG REKOMENDASI STUDI KE LUAR NEGERI	WORKSHOP DAN SOSIALISASI	MENSOSIALISASIKAN BAHWA SETIAP SANTRI YANG AKAN MELAKUKAN STUDI KE LUAR NEGERI HARUS MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN AGAMA	SANTRI YANG AKAN STUDI KE LUAR NEGERI BETUL BETUL MENDAPATKAN LEGALITAS DAN IZIN RESMI DARI KEMENTERIAN AGAMA	SANTRI						Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
17	Menyusun Produk KIE dan Bahan Promosi lainnya baik di media cetak maupun elektronik	Rapat Tim dalam Penyusunan Produk KIE dan Bahan Promosi Pencegahan RAD dan TPPO sejak dini	Diskusikan konsep produk KIE dan bahan Promosi Pencegahan RAD dan TPPO sejak dini	Leaflet, Brosur Digital, Video Layanan Masyarakat, Twibbon	Meningkatkan Pencegahan TPPO	50%	50%	80%	80%	90%	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
18	Mendesiminasiikan Produk KIE dan Bahan Promosi lainnya baik di media cetak maupun elektronik	Deseminasi Produk KIE dan Bahan Promosi Pencegahan RAD dan TPPO sejak dini	Deseminasi Produk KIE dan Bahan Promosi Pencegahan RAD dan TPPO sejak dini	Pengetahuan dan RTL Pencegahan RAD dan TPPO	Meningkatkan kerjasama dengan koordinasi diantara gugus tugas	50%	50%	80%	80%	90%	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
19	Sosialisasi TPPO Takmir Masjid Majelis Taklim	Pertemuan Majelis tentang Masjid Wadah KIE dan Rehab TPPO	Focus Discusi Grup	Tanggung jawab bersama	Korban TPPO dan Pelaku TPPO	50%	50%	80%	80%	90%	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Junlahi IKM yang mengikuti yokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan	IKM/Masyarakat umum (wanita/prila)		300 IKM	350 IKM	375 IKM	400 IKM	Dinas Perindag Provinsi Lampung
21	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap kewenangan Provinsi	Prosentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Perangkat Daerah Kab/Kota, Lembaga, TIM Gugus Tugas	-	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	Dinas PPPA Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Prosentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Perangkat Daerah Kab/Kota, Lembaga	200 org	200 org	200 org	200 org	200 org	Dinas PPPA Provinsi Lampung
22	Gham jow sanak uy!	Memperkenalkan Forum Anak dan peran 2P di kalangan pelajar hits SMP/ SMA. Dan mengingatkan bahwa mereka berstatus "anak" yang memiliki hak dan kewajiban. Serta menunjukan Sekolah Favorit agar naiknya rating Forum Anak di kalangan pelajar Ibu Kota.	Sosialisasi tentang pentingnya Forum Anak dalam kehidupan bermasyarakat.	Terjalin hubungan yang baik antar Forum Anak di provinsi Lampung dan memperluas nama Forum Anak Daerah Lampung.	Angka kekerasan anak dalam lingkungan sekolah menurun.	5	10	10 sekolah	15 sekolah	20 sekolah	Forum Anak Daerah Lampung, Forum Anak Kabupaten dan Kota,
23	Pah gham pedulei sanak Disabilitas!	Memberi bantuan sosial, memotivasi, dan bermain dengan anak-anak yang mengalami disabilitas dan gangguan kesehatan mental	Mengadakan open donasi di Sosial Media, bekerja sama dengan Organisasi Sosial yang ada, pemberian donasi serta melaksanakan acara yang ditentukan	Perayaan Hari Disabilitas Internasional	Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dapat menurun.	100%	100%	100%	100%	100%	Forum Anak Daerah Lampung, Forum Anak Kabupaten dan Kota,
24	Poster Edukasi	Mengunggah poster yang berkenaan dengan TPPO di Instagram FAD Lampung.	Sosialisasi secara online melalui poster yang diberikan.	Anak akan membagikan poster tersebut di akun Instagram mereka	Anak yang selalu memainkan gawainya akan mendapatkan informasi baru.	100%	100%	100%	100%	100%	Forum Anak Daerah Lampung, Forum Anak Kabupaten dan Kota,
25	Advokasi Kebijakan	Adanya monitoring perkembangan MoU Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung		Adanya kebijakan daerah (perda/pergub/perbup) yang mendapat input tentang layanan yang berpihak pada korban, berbasis hak asasi manusia dan mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja migran	Pemerintah Provinsi Lampung, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Penyedia Layanan						Lembaga Advokasi LaDa Damar
		Penyusunan Pergub Lampung Mengenai SOP/Mekanisme Rujukan Penanganan Kasus kTP Pekerja Migran dan Keluarganya serta Perdagangan Orang		Adanya kebijakan daerah (perda/pergub/perbup) yang mendapat input tentang layanan yang berpihak pada korban, berbasis hak asasi manusia dan mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja migran							Lembaga Advokasi LaDa Damar
26	Kampanye	Menginisiasi Pembuatan Media Informasi online dan offline tentang: Migrasi Aman up date pekerja migrasi dari desa tersebut (nama PMI, alamat, nama orang tua, nomor telepon), info layanan dan penempatan		Adanya kebijakan daerah (perda/pergub/perbup) yang mendapat input tentang layanan yang berpihak pada korban, berbasis hak asasi manusia dan mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja migran	Masyarakat Luas						Lembaga Advokasi LaDa Damar
27	Penguatan Jaringan	Melaksanakan diskusi kritis tematik jaringan kelompok perempuan, sebaya, orang berbasis masyarakat, serikat pekerja untuk pencegahan kekerasan TPPO sepanjang siklus migrasi di 3 desa (Adiliwih, Ambarawa, Sukoharjo) di Kabupaten Pringsewu.		Membangun dan memperkuat jaringan sebaya (peer-to-peer) perempuan pekerja migran di tingkat nasional dan internasional.	Jaringan Kelompok Perempuan, Sebaya, Organisasi Masyarakat, Serikat Pekerja						Lembaga Advokasi LaDa Damar
28	Pendataan kasus kekerasan	Penyusunan databased kasus kekerasan terhadap perempuan migran korban kekerasan dan keluarganya serta korban TPPO		Adanya pengumpulan data kekerasan terhadap perempuan yang terpilih berdasarkan status migrasinya.	Pemerintah Provinsi Lampung, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Penyedia Layanan						Lembaga Advokasi LaDa Damar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Advokasi	Bimbingan Korban	Konseling Korban	Korban Merasa Aman	Korban Kekerasan/TPPO						UIN Raden Intan
30	Sosialisasi Peraturan Rektor	Sosialisasi kepada mahasiswa	FGD (Forum Grup Discussion)	Mahasiswa dapat memahami peraturan rektor tentang pencegahan dan kekerasan/TTPO	Mahasiswa UIN						UIN Raden Intan
31	Sekolah Gender	Pemberian Materi dan Diskusi	Seminar	Peserta memahami Gender/keadilan Gender	Mahasiswa						UIN Raden Intan
32	Pembentukan ULT (Unit Layanan Terpadu)	Sosialisasi	Edukasi penanganan kasus	Menangani korban	Mahasiswa dan Dosen						UIN Raden Intan
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga yang dibina	Lembaga Unit Pelayanan Pemberdayaan Keluarga (UP-2K) Kabupaten/kota	3	3	3	3	3	Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung
34	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan tata kelola destinasi pariwisata	Fasilitasi TIM Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan Pokja PKK yang terlaksana	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	5	5	5	5	5	Dinas PMD dan Transmigrasi Provinsi Lampung
35	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan penerapan sapta pesona	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	200 org					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

B. REHABILITASI KESEHATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN					INSTANSI/LEMBAGA	
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Mengusulkan anggaran dalam penanganan medis bagi perempuan bekerja sama dengan BPJS.		Penguatan Lintas Sektor pada pencegahan dan penanganan TPPO	Korban TPPO						Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
2		Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAD		Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi korban TPPO	RSJAM PKM						Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	
3	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Perempuan Pelayanan Pemeriksaan IVA dan Kontrasepsi MKJP	1. Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Perempuan 2. Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara 3. Pelayanan Pemeriksaan IVA 4. Pelayanan Kontrasepsi MKJP	1. Meningkatkan pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Perempuan 2. Terdeteksinya Kasus Kanker Serviks dan Payudara 3. Tertanganinya Kasus Kanker Serviks 4. Meningkatnya Akseptor KB MKJP	Wanita Usia Subur (WUS) Provinsi Lampung	1500	1500	1500	1500	1500	Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung	

			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pasien yang dilayani	ada	ada	ada	ada	Rumah Sakit Jiwa Daerah
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pasien yang dilayani	ada	ada	ada	ada	Rumah Sakit Jiwa Daerah
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pasien yang dilayani	ada	ada	ada	ada	Rumah Sakit Jiwa Daerah

C. REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN					INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penanganan dan Pelayanan		Penyediaan layanan bagi pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Jumlah kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan.	Terlaksananya perempuan dan anak korban tindak kekerasan.						UPTD PPPA Dinas PPPA Provinsi Lampung
			Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.								UPTD PPPA Dinas PPPA Provinsi Lampung
2	Rehabilitasi Sosial		Reintegrasi Sosial	Jumlah korban perempuan dan anak yang mendapatkan layanan rumah aman.	Pemulangan korban ke daerah asal.						UPTD PPPA Dinas PPPA Provinsi Lampung
3	Pendampingan Pemulangan dan Penguatan mental korban dalam kehidupan sosial		Pendampingan korban ketika ada masalah hingga kepulangan	Korban dapat tertangani dengan maksimal dan dapat beradaptasi di lingkungan sosial tanpa minder	Korban TPPO dan kasus PMI Lainnya	20 org	17 org				Serikat Buruh Migran Indonesia
4	Pendampingan Pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarga		Pembentukan koperasi Purna PMI, Pembentukan SBMI Mart, Pelatihan usaha bagi mantan PMI	Masyarakat lebih sejahtera dengan memanfaatkan potensi desanya	CPMI, Keluarga PMI, Purna PMI	3 Koperasi	4 koperasi				Serikat Buruh Migran Indonesia
5	Pendampingan Pemulangan dan Penguatan mental korban		Terpenuhinya hak-hak korban TPPO perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan rehasos, pemulangan dan reintegrasi sosial	Melaksanakan pelayanan pemulangan	Pemulangan korban ke daerah asal.						UPT BP2MI Tanjung Karang
6	Penanganan Korban Kasus TPPO		Penjemputan dan pemulangan korban TPPO	Tidak ada korban TPPO yang terlantar	Korban TPPO khususnya dari Batam						Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau
7	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Facilitasi pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten / kota asal	Terlaksananya pemberian bantuan kepada warga negara migran tindak kekerasan	Warga negara migran korban tindak kekerasan	15 orang (100%)	15 orang (100%)	15 orang (100 %)	17 orang (100 %)	20 orang (100 %)	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
8	Pemulangan aman bagi korban TPPO		Pelayanan Pemulangan dengan ambulance bagi PMI terkendala dalam kondisi sakit	Penyediaan rasa aman dan wujud kehadiran negara dalam melindungi warganya	PMI terkendala			ada	ada	ada	UPT BP2MI Tanjung Karang
9	Facilitasi bantuan tanggap darurat bagi korban TPPO yang meninggal dunia		Pelayanan Pemulangan Jenazah	pengetahuan kepada para peminat untuk tidak termakan bujuk rayu yang dapat menjadikan mereka korban penipuan/ TPPO	PMI meninggal dunia			ada	ada	ada	UPT BP2MI Tanjung Karang
10	Pelaksanaan program pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya		Kegiatan Pemberdayaan melalui program kewirausahaan	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi PMI dan keluarganya melalui edukasi keuangan,kewirausahaan dan kegiatan produktif	PMI Purna dan keluarganya			ada	ada	ada	UPT BP2MI Tanjung Karang
11	Pembinaan Pelaku TPPO dan Rehabilitasi Korban TPPO		Terapi (Rugyuh) dengan Penyuluh Agama dalam Grup Diskusi Keagamaan	Timbul Pemahaman dan Kesadaran	Korban TPPO dan Pelaku TPPO	50%	80%	80%	90%	90%	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
12	Pemeriksaan Keimigrasian terhadap korban atau pelaku TPPO		Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian serta data pendukung terhadap korban atau pelaku TPPO	Data keimigrasian korban atau pelaku TPPO terintegrasi dengan sistem informasi keimigrasian		monitoring	monitoring	monitoring	monitoring	monitoring	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
13	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI		Peningkatan Norma Kerja Perempuan dan Anak di Perusahaan yang ada di Provinsi Lampung	Memberikan Wawasan untuk bekerja legal.	Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	120	120	120	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

D. PENGEMBANGAN NORMA HUKUM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN					INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan penyusunan produk hukum daerah meliputi Perda, Perkada, Keputusan Gubernur dan MoU	Mengkaji dan merevisi Produk Hukum Daerah yang berkenaan dengan TPPO sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Mengharmonisasi dan mensinkronisasi Produk Hukum Daerah di Biro Hukum	- Peraturan Daerah - Pergub - Keputusan - MoU	- OPD terkait - Masyarakat - Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	-	V	-	-	Biro Hukum Setdaprov Lampung
3	Fasilitasi penyusunan Naskah akademik/penjelasan /keterangan rancangan produk hukum daerah tentang Pencegahan TPPO	Penyusunan Draf Naskah Akademik/Penjelasan dan /atau keterangan Rancangan Produk Hukum Daerah	Rapat penyusunan Naskah Akademik	Konsep naskah akademik/penjelasan/keterangan tentang pencegahan TPPO	Terbentuknya perencanaan pembentukan produk hukum melalui penyusunan Naskah akademik/penjelasan	25%	25%	50%	50%	100%	KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG
4	Pengharmonisan,pembulatan,dan pemantapan konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah	Pelaksanaan pengharmonisan,pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah tentang pencegahan dan pengendalian TPPO	Rapat pengharmonisan,pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah tentang pencegahan dan pengendalian TPPO	Terharmonisasinya rancangan produk hukum daerah tentang Pencegahan dan pengendalian TPPO	Dihasilkannya rancangan produk hukum daerah yang memuat materi tentang pencegahan dan pengendalian TPPO	25%	25%	50%	75%	100%	KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG
5	Analisis dan Evaluasi produk Hukum Daerah tentang Pengendalian dan Pencegahan TPPO	Penyusunan Dokumen analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah tentang pengendalian dan pencegahan TPPO	Rapat kelompok Kerja atau team Analisis dan evaluasi Produk Hukum daerah	Rapat kelompok Kerja atau team Analisis dan evaluasi Produk Hukum daerah							KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG
6	Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Penyuluhan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Agar tidak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Masyarakat Umum dan Generasi Muda	50	40	35	30	20	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
7	Penyelenggaraan Pengawasan Ketengakerjaan	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di Perusahaan	Persentasi perusahaan yang menyelenggarakan Norma Kerja dan Norma K3 di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Ketengakerjaan di Perusahaan (termasuk Perusahaan yang memperkerjakan TKA)	Pekerjaan di Perusahaan	30	50	50	45		Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung

E. PENEKAKAN HUKUM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN					INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberkasan Perkara	Lidik dan Sidik Koordinasi dengan instansi terkait	- Pemeriksaan Terhadap Korban/Saksi - Melengkapi Mindik - Pendampingan korban - Mencari kelengkapan informasi	Berkas lengkap sampai tingkat Tahap I dan II dan BB	P21 Pelimpahan tersangka dan BB						Polda Lampung
2	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penanganan atas Pelanggaran Daerah dan Peraturan Gubernur	Meningkatnya Pengetahuan dan Disiplin Pelaku Usaha dan Masyarakat tentang Perda dan Pergub	Pelaku Usaha Masyarakat, Lembaga, Badan Hukum, Pelajar	30 SMU Sederajat	30 SD SMP sederajat	30 SD SMP SMU sederajat	30 SD SMP SMU sederajat	30 SD SMP SMU sederajat	Sat Poi PP Provinsi Lampung
3	Penegakan Hukum	Penuntutan	- Pra Penuntutan	Berkas Perkara Lengkap dan atau Berkas Perkara tidak Lengkap	Tersangka						Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
4			- Penuntutan	Terbukti suatu perkara	Terdakwa						Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
5			- Eksekusi	Incracht atau banding atau kasasi	Terpidana						Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung

F. KOORDINASI DAN KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TRAFFICKING

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	SASARAN	TARGET SASARAN					INSTANSI/LEMBAGA
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Kemampuan dan Integritas Pegawai	- Sosialisasi Peraturan TPPO - Monitoring dalam pengawasan pelayanan paspor - Sosialisasi terhadap masyarakat pada wilayah kerja - Koordinasi dengan stakeholder terkait	Pertemuan audiensi, advokasi kebijakan dan koordinasi intens, FGD Multi pihak - pendampingan hukum bagi korban TPPO - Pendampingan pemeriksaan medis dan psikologi bagi korban. - penguatan konselor sebaya untuk membangun ruang aman dan pendampingan perempuan yang memiliki persoalan KSR dan Kp/A dan TPPO pengorganisasian kelompok perempuan muda untuk pendidikan kritis pencegahan Kp/A dan TPPO	Menguatkan peran jejaring dan sinergisitas	Lembaga masyarakat, komunitas di desa, stakeholder dan OPD	5 Pertemuan	9 Pertemuan				Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
2	Penguatan jaringan bersama komunitas masyarakat dan OPD	Penguatan jaringan bersama komunitas masyarakat dan OPD									Serikat Buruh Migran Indonesia
3	Pemberian bantuan hukum jika korban ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum				perempuan korban TPPO						Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
4	Tuang aman untuk akses informasi dan layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) dan TPPO				- Konselor sebaya dan kelompok perempuan muda						Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
5	Membangun sinergi kerjasama lembaga penyedia layanan korban Kp/A dan TPPO				- Konselor sebaya dan kelompok perempuan muda						Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR
6	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar	- Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Usaha/Swasta - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Dokumen - Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Dokumen Kerjasama Badan Usaha/Swasta yang dilegitimasi - Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	- Usulan Dokumen Kerjasama - Usulan Dokumen Kerjasama Badan Usaha/Swasta dilegitimasi - Dievaluasinya Kegiatan Kerjasama Antar Pemerintah, Badan Usaha/Swasta pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
7	Avokasi Kebijakan	Adanya pertemuan pembahasan Keputusan Kepala Desa Pembentukan Satgas Desa sebagai Pusat Layanan Informasi Terpadu terkait Migrasi Aman		Adanya kebijakan daerah (perda/pergub/perbup) yang mendapat input tentang layanan yang berpihak pada korban, berbasis hak asasi manusia dan mengakomodasi kebutuhan perempuan pekerja migran	Aparatur Pemerintah Desa						Lembaga Advokasi LaDa Damar
8	Avokasi Kebijakan	Adanya pertemuan Forum Multi Stakeholder untuk perlindungan serta pencegahan TPPO bagi Pemerintah dan CSO Tingkat Provinsi Lampung		Adanya koordinasi dan akses terhadap layanan berkualitas, diinformasikan oleh data layanan, untuk perempuan pekerja migran	Pemerintah Provinsi Lampung, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Penyedia Layanan, BP2MI						Lembaga Advokasi LaDa Damar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Advokasi Kebijakan	Adanya pertemuan penyusunan SOP Mekanisme Rujukan/Layanan bagi Perempuan Pekerja Migran dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan TPBC		Adanya koordinasi dan akses terhadap layanan berkualitas, diinformasikan oleh data layanan, untuk perempuan pekerja migran	Pemerintah Provinsi Lampung, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Penyedia Layanan, BP2MI						Lembaga Advokasi LaDa Damar
10	Penguatan Jaringan	Mengadakan pelatihan pengembangan usaha dan menghubungkannya dengan pihak desa, kabupaten, maupun pihak swasta untuk mengakses pelatihan, permodalan atau dukungan lainnya		Membangun dan memperkuat jaringan sebaya (peer-to-peer) perempuan pekerja migran di tingkat nasional dan internasional.	Buruh Migran Purna						Lembaga Advokasi LaDa Damar
11	Penguatan Jaringan	Memfasilitasi pembentukan satgas desa sebagai pusat layanan informasi terpadu terkait data PPMI, informasi migrasi aman, informasi dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri serta pos pengaduan berbasis desa/raukon di Kab. Bontosaatu		Membangun dan memperkuat jaringan sebaya (peer-to-peer) perempuan pekerja migran di tingkat nasional dan internasional.	Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat dan agama, Komunitas						Lembaga Advokasi LaDa Damar
12	Penguatan Lembaga Layanan	Mengadakan pelatihan bagi petugas lembaga layanan mengenai pemenuhan kebutuhan perempuan pekerja migran, korban kekerasan dan keluarganya serta perdagangan orang di tingkat Provinsi Lampung		Pengetahuan dan keterampilan penyedia layanan meningkat dalam memberikan layanan dasar untuk korban kekerasan dan perdagangan orang	Aparat Penegak Hukum, Petugas Lembaga Penyedia Layanan						Lembaga Advokasi LaDa Damar

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI